

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri jasa keuangan atau IJK yaitu kelompok perusahaan yang menyediakan produk di bidang jasa keuangan untuk masyarakat dan perusahaan lainnya. Produk dan layanan keuangan resmi disediakan oleh lembaga jasa keuangan resmi yang mempunyai persetujuan, ditentukan, dan diawasi oleh OJK. OJK memberikan wewenang memberikan izin atau mencabut izin lembaga jasa keuangan yang tidak lagi sesuai dengan kriteria. OJK menata semua industri jasa keuangan Indonesia yang meliputi industri perbankan, pasar modal, asuransi, pendanaan, dana pensiun, serta perusahaan jasa keuangan lainnya. Yang di atur dalam UU RI no.21 tahun 2011 mengenai OJK. Industri jasa keuangan mempunyai tiga Ruang cakupan yakni industri perbankan, industri non bank, dan industri pasar modal.

Salah satu ruang lingkup industri jasa keuangan yaitu Industri perbankan yang memiliki peran begitu utama dalam perekonomian Indonesia. Industri perbankan ialah pilar penting pada bagian industri keuangan. Perbankan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank mencakup kelembagaan, aktifitas usaha, beserta cara dan prosedur dalam melakukan pencapaian bisnisnya. Bank Umum merupakan bank yang melakukan aktifitas usaha secara konvensional dengan beralaskan pedoman syariah yang pada aktifitasnya memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Menurut UU No.7 Tahun 1992 yang sudah dirubah menjadi UU No.10 Tahun 1998, bank ialah wadah usaha yang mengerahkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan juga menyalurkannya terhadap masyarakat berupa pinjaman maupun sebagainya dalam rangka sebagai peningkat taraf kehidupan

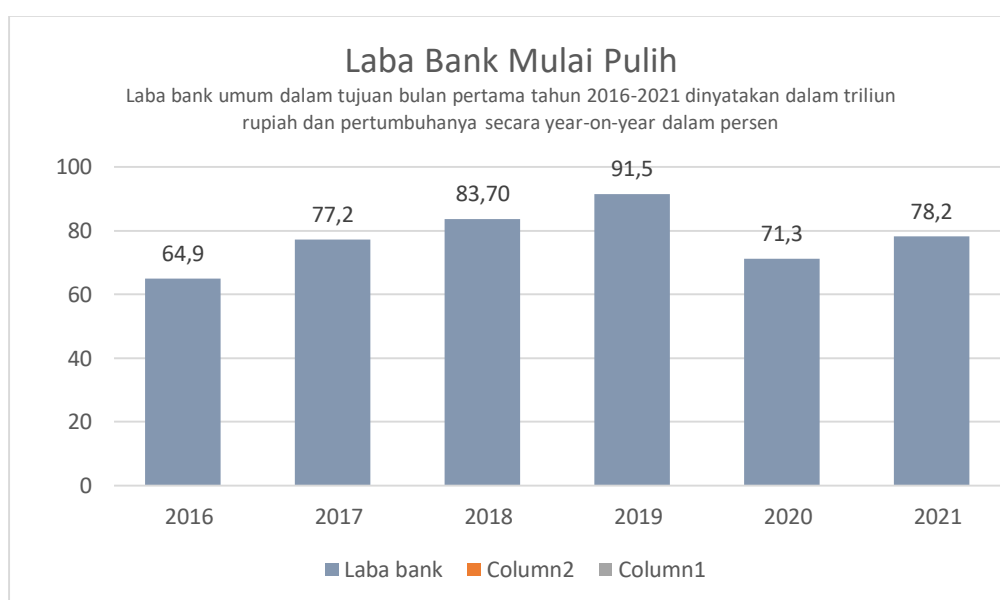
masyarakat luas.

Bank bisa dikatakan seperti darah perekonomian di sebuah negara. Oleh sebab itu kemajuan sebuah bank di sebuah negara bisa juga digunakan untuk pengukuran tingkat kemajuan negara yang bersangkutan. Bertambah majunya suatu negara, bertambah besar fungsi perbankan sebagai pengendali negara tersebut. Maknanya adanya dunia perbankan makin dibutuhkan oleh pemerintah serta masyarakat. Di dunia modern saat ini, fungsi perbankan untuk menggerakkan ekonomi sebuah negara amatlah luas. Hampir seluruh sektor berkaitan terhadap bermacam aktifitas keuangan mesti memerlukan bantuan bank. sebab itu sekarang dan seterusnya masyarakat tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan, apabila ingin melakukan kegiatan keuangan, baik pribadi maupun lembaga, dan sosial maupun korporasi.

Menurut Kasmir (2014), mayoritas bank yang tumbuh di Indonesia merupakan bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. UU No.21 Tahun 2008 menyatakan jika bank dengan landasan konvensional ialah bank yang melakukan aktifitas bisnisnya secara konvensional yang aktifitasnya memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum konvensional pada pelaksanaan aktifitasnya memakai dua cara seperti menentukan bunga untuk harga jual dan harga beli mengenai produknya yang lumrah dikenal spread based, dan menggunakan atau menerapkan biaya- biaya dalam jasa-jasainnya yang dikenal dengan istilah fee based (Kasmir, 2014). perbankan konvensional mengalami negative spread yakni mempunyai kewajiban untuk melunasi bunga kepada nasabahnya pada semua kondisi hingga menjadi bebanyang senantiasa melekat bagi bank (Marbelanty & Adityawarman, 2015).

Tujuan primer bank ialah untuk menaikkan keuntungannya, salah satu parameter dipakai menyaksikan hal tersebut ialah dengan melihat perkembangan laba. Perkembangan

laba adalah persentase peningkatan laba yang dihasilkan bank. besar kecilnya laba yang didapat akan berdampak pada dividen yang akan dibayar di waktu mendatang tergantung keadaan perbankan. Perbankan dengan keuntungan yang terus berkembang akan mempunyai total asset tinggi, sehingga menghasilkan kesempatan yang lebih tinggi untuk meningkatkan profitabilitas. sesuai hal tersebut maka, menjadi kewajiban dan tanggung jawab pihak manajemen bank agar mengolah dananya secara efisien agar keuntungan yang didapat semakin naik setiap tahunnya (Mayasari et al., 2019).

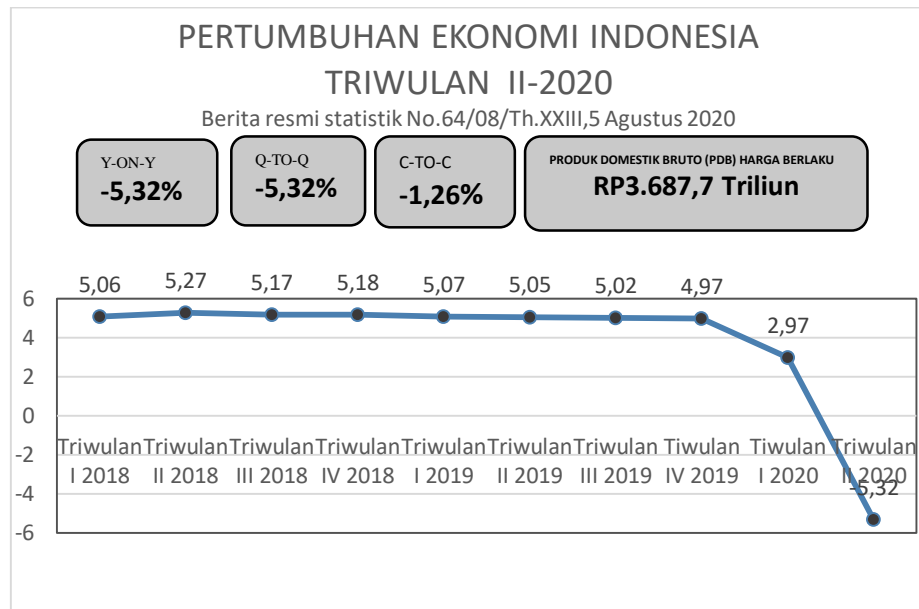


Gambar 1. 1 Grafik Data Laba Bank Umum Tahun 2016-2021.

Sumber : ojk.go.id

Dari grafik diatas bisa dilihat ditahun 2020 perbankan indonesia mengalami penurunan yang signifikan sebesar 22,1% dibanding tahun-tahun sebelumnya yang terus mengalami peningkatan. Kegiatan intermediasi perbankan indonesia pada tahun 2020 ini dinilai tidak sesuai dengan teori pertumbuhan DPK yang berjalanselaras dengan pertumbuhan penyaluran pinjaman. Kondisi ini mengganggu aktivitas perbankan dalam menghasilkan pendapatan. Karena penempatan DPK pada aktiva produktif kredit dan pembiayaan mengalami penurunan,

sehingga laba perbankan tahun 2020 juga turut mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

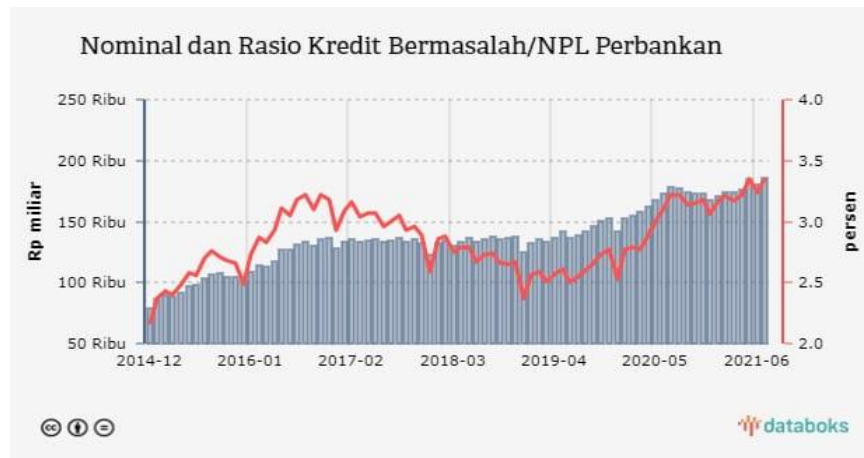


Gambar 1. 2 Gragik Pertumbuhan Ekonimi Indonesia Triwulan II Tahun 2020.

Sumber : bps.go.id

Badan pusat statistik (BPS) nasional mencatat perekonomian indonesia triwulan II-2020 dibandingkan triwulan II-2019 mendapati kontraksi (minus) perkembangan senilai 5,32%. dari segi produksi, Lapangan bisnis Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi perkembangan terbesar senilai 30,84%. dari segi pengeluaran, unsur Ekspor dan Impor Barang dan Jasa mendapati reduksi pertumbuhan sebesar 11,66% dan 16,9%. Perekonomian Indonesia triwulan II-2020 dibandingkan triwulan sebelumnya juga mendapati reduksi perkembangan senilai 4,19% (q-to-q). Sedangkan dari segi pengeluaran, unsur Ekspor dan Impor Barang dan Jasa mengalami reduksi perkembangan masing-masing sebesar 12,81% dan 14,16%.

Dikutip dari surat kabar di Jakarta www.infobanknews.com pada 06 bulan November di tahun 2020, diberitakan kebanyakan bank besar mengalami kenaikan Non Performing Loan (NPL) pada semester I – 2020. Kecondongan tersebut berlangsung, meski bank telah mengadakan restrukturisasi kredit cukup besar. Pada bulan Juni 2020, rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat senilai 3,11% (bruto) dan 1,16% (netto). Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) berkembang hingga 8%.



Gambar 1. 3 Grafik NPL Perbankan Indonesia.

Sumber : ojk.go.id

Dari gambar grafik di atas dapat dilihat turunnya NPL perbankan di Indonesia pada tahun 2021. Risiko kredit perbankan melonjak menjadi 22,66% pada Juni 2020 dibandingkan pada Desember 2019 yang cuma sebesar 9,33%.

Salah satu sektor perbankan yang tumbuh di kalangan masyarakat kecil menengah ialah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasarkan undang-undang dasar hukum BPR yakni UU No.7 Tahun 1992 yang sudah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan jika BPR merupakan bank yang melakukan aktivitas usaha secara konvensional atau berlandaskan prinsip syariah yang pada aktivitasnya tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran, artinya aktivitas BPR jauh lebih sempit

daripada aktifitas bank umum. aktifitas usaha yang bisa dilakukan BPR antara lain mengerahkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan serta bentuk lain yang disamakan dengan itu.

Perbedaan Bank Umum dan BPR Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Bank Umum ialah bank yang kegiatannya memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran, berbeda dengan BPR yang tidak memberikan pelayanan tersebut. Perbedaan lainnya terletak pada bentuk dana warga. Bank Umum menghimpundana pada bentuk giro serta sertifikat deposito, sedangkan BPR menghimpun dana pada bentuk tabungan serta deposito. Perbedaan Bank Umum dan BPR Secara khusus yaitu, persyaratan modal untuk BPR lebih sedikit dari bank umum konvensional yang harus mempunyai modal minimal Rp3 triliun serta bank syariah sebesar Rp1 triliun. BPR lebih beragam tergantung 4 zona yang terbagi pada Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No.20/POJK.03/2014 pasal 5. Modal BPR di zona 4 mulai dari nilai 4 miliar, zona 1 sebesar 14 miliar. Second Reach Area BPR mempunyai cakupan daerah kabupaten, sedangkan bank umum yang tidak terbatas. Adanya cakupan wilayah layanan BPR sebanding dengan maksud pendirian BPR sehingga kantor lebih sederhana dibandingkan dengan kantor bank umum. Kemudian dari segi pelayanan BPR tentu memiliki pelayanan yang terbatas dan sederhana. Bank komersial cukup kompleks dalam hal layanan, seperti asuransi, valuta asing, dan giro. dalam Layanan Simpan Pinjam Baik jenis bank konvensional maupun BPR dapat melayani simpanan dan kredit. Perbedaannya hanya pada layanan kedua bank tersebut. Dan Dari aktifitas Usaha, BPR melayani deposito, tabungan, kredit, penempatan dana SBI (Surat Berjangka Indonesia, sertifikat deposito, pembiayaan, deposito berjangka, dan penempatan dana. Sedangkan bank umum melayani lebih dari seluruh itu. aktifitas bank umum lain yaitu penerbitan surat pengakuan utang, valuta asing, kliring,

transfer, inkaso, dan lain-lain.

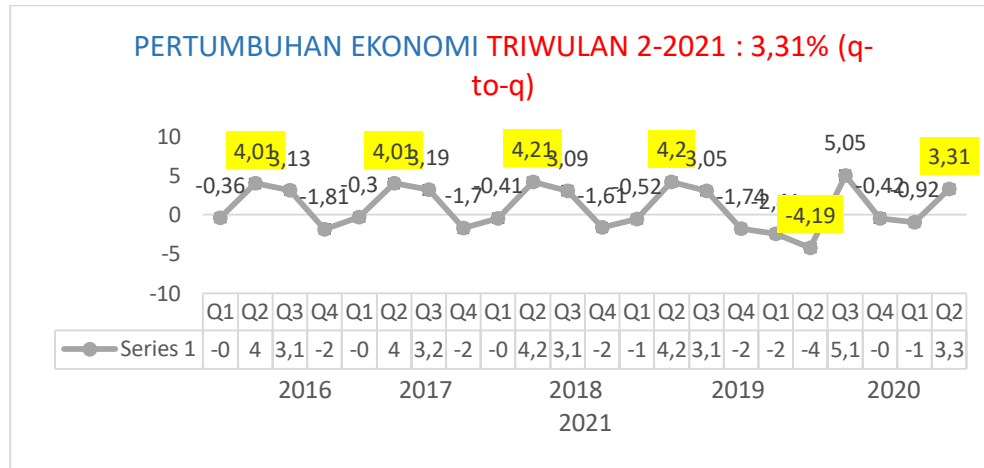
Persaingan untuk kualitas sekarang merambat ke semua bidang, termasuk perbankan. Sekarang bank dipandang sebagai kebutuhan dan relasi dalam berbisnis, sehingga tiap bank diharuskan untuk mempunyai kelebihan dalam memperebutkan kepercayaan masyarakat. Pesatnya pertumbuhan perbankan di masa ini menuntut manajemen bank agar dapat mengelola usahanya secara baik. Keadaan ini menimbulkan persaingan amat ketat, sehingga bank yang dapat mengelola usahanya secara baik akan mampu bertahan bahkan berkembang, namun untuk bank yang tidak dapat mengelola usahanya secara baik akan semakin terpuruk dan akhirnya rugi dalam kompetisi yang sangat ketat. Sebagian kunci agar bank bisa memenangkan tingkat kompetisi yang ketat ialah dengan memperoleh kepercayaan nasabah dengan memberikan kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah akan terwujud jika mereka mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan dengan merasa puas maka nasabah akan menunjukkan loyalitasnya (Budiwati, 2017). Keberadaan Bank Umum serta BPR yang beda tapi dengan pangsa pasar sama membuat tingkat kompetisi antar dua jenis bank ini makin meningkat tajam dari waktu ke waktu. BPR yang relatif jangkauan wilayahnya jauh lebih sempit dengan segala keterbatasan yang dimiliki harus bersaing dengan Bank Umum. Namun begitu ditengah persaingan yang sangat tajam ini, BPR harus mampu bertahan dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu masing-masing Bank Umum dan BPR harus bersaing agar kedua bank ini mampu bertahan dan mempunyai pangsa pasar nya sendiri.

Di Indonesia umumnya keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bisa dikatakan sudah bisa membantu pertumbuhan usaha masyarakatnya, apalagi untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan lokasi yang juga dekat dengan tempat tinggal masyarakat yang membutuhkan (Chou & Buchdadi, 2016). Sebagai salah satu lembaga keuangan

perbankan, peran BPR ikut menentukan keberhasilan perekonomian daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Perbankan (UU RI No. 10 Tahun 1998).

Salah satu mitra BPR yang tumbuh dilingkungan masyarakat kecil menengah adalah para pekerja karyawan buruh industri perseroan terbatas (PT). Keadaan BPR di Indonesia kini semakin diberatkan dengan adanya aturan baru tentang permodalan BPR. Kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR tertuang dalam POJK Nomor 5/POJK.03/20215. BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi modal inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024. Pada saat berlakunya ketentuan ini, BPR yang memperoleh izin usaha dari OJK dengan modal disetor kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) wajib memenuhi modal inti minimum paling lambat 5 (lima) tahun usai mendapat izin usaha dari OJK. OJK mencatat, jumlah BPR yang termasuk dalam kategori BPRKU 3 dengan modal inti lebih dari Rp 50 miliar mencapai 52 BPR. Sedangkan, BPRKU 2 dengan modal inti di antara Rp 15 miliar hingga Rp 50 miliar berjumlah 221 BPR. Sedangkan jumlah BPRKU 1 atau modal inti di bawah Rp 15 miliar sebanyak 1.324 BPR.

OJK juga mengatur pembentukan BPR baru berdasarkan zonasi wilayah pada Desember 2020. Ketentuan itu tertera dalam POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang BPR. Modal disetor pendirian BPR ditetapkan minimal Rp100 miliar untuk BPR yang didirikan di zona 1, Rp50 miliar di zona 2, dan Rp25 miliar di zona 3. Hal ini dijalankan agar BPR dapat merata di seluruh wilayah. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan itu, OJK akan membatasi kegiatan BPR. Dengan adanya sanksinya pembatasan aktifitas. Bagi yang sebelumnya memiliki kegiatan terkait valuta asing, KUPVA (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing), atau terkait ATM, akan dibekukan terlebih dahulu.



Gambar 1. 4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 2-2021.

Sumber : bps.go.id

Kabar baik diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pemulihan perekonomian Indonesia mulai terlihat di pertengahan tahun 2021. Hal itu ditandai oleh catatan pertumbuhan ekonomi dalam triwulan kedua tahun ini yang mencapai sebesar 3,31% (QtQ). Dengan demikian secara tahunan atau year on year (yoy) perkembangan ekonomi pada triwulan II 2021 adalah sebesar 7,07%. Sumber utama pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua

2021, sebanyak 64,85% bersumber dari sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan. Sedangkan sektor usaha yang sangat tinggi tumbuhnya ialah sektor transportasi dan pergudangan sejumlah 25,10%, akomodasi dan makanan minuman sebesar 21,58% dan sektor jasa 11,97%.

Bank yang selalu mampu mempertahankan kinerja yang bagus terutama tingkat profitabilitas yang tinggi dan dapat memberikan deviden dengan baik dan prospek usaha yang selalu bisa berkembang dan bisa memenuhi persyaratanperaturan prudential banking dengan baik, maka berkemungkinan nilai saham bank yang berkaitan dipasar sekunder dan jumlah dana yang terkumpul dari pihak ketiga akan meningkat. Tingkat kesehatan suatu

bank adalah hasil penilaian terhadap bermacam aspek yang mempengaruhi kinerja bank melalui penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan kepekaan terhadap risiko pasar. Penilaian tingkat kesehatan bank bertujuan untuk menilai keberhasilan perbankan dalam perekonomian dan industri perbankan serta dalam mempertahankan fungsi intermediasi. Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya (Suhardi & Darus, 2013).

Dalam menilai kinerja keuangan suatu bank, salah satu indikatornya adalah dengan melihat tingkat profitabilitasnya, dimana semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu bank, maka semakin tinggi juga kinerja bank itu. Sehingga dapat dikatakan indikator yang paling tepat digunakan dalam mengukur kinerja bank adalah profitabilitas (Azwan & Hasan, 2016). Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas menggunakan rasio seperti ROA, NPL, LDR, CAR, BOPO dan Size. Return on assets ratio (ROA) atau lebih dikenal sebagai rasio pengendalian aset ini adalah rasio profitabilitas sebagai menilai presentase laba yang didapat perusahaan terkait sumberdaya atau seluruh aset hingga efisiensi sebuah perusahaan dalam mengolah aset yang dimiliki dapat dilihat dari presentase rasio ini.

NPL atau kredit yang bermasalah ialah suatu ukuran untuk melihat kesehatan aktiva pada sebuah organisasi keuangan baik bank maupun fintech. NPL ini mampu memberikan memberikan sebuah pengetahuan penilaian atas kondisis permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, hingga likuiditas. LDR (*loan deposit ratio*) digunakan untuk menunjukkan indikator likuiditas perbankan. CAR (*capital adequacy ratio*) atau rasio kecukupan modal digunakan sebagai penunjuk tenaga dalam bank sebagai penahan kerugian semasa krisis. problem kecukupan modal adalah perhal utama pada usaha perbankan. Modal yaitu sebagian dana pribadi yang tersedia sebagai pendukungusaha bank dan berbuat untuk penyongkong bila terjadi keadaan yang merugikan (Athanasoglou et al., 2008). Efisiensi operasional (BOPO) rasio inidigunakan untuk mengukur efisiensi operasional pada suatu bank, dengan caramembandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Bank Indonesia menentukan rasio BOPO tidak boleh melebihi 90%, jika melebihi maka ditetapkan bank tidak efisien sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/ DPNP tanggal 31 Mei 2004. Sedangkan rasio Size mencocokkan perubahan detail pada total aktiva, kewajiban, dan penjualan. Perbandingan ini disediakan sebagai proporsi per komponen dalam laporan keuangan, baik padaneraca maupun laporan laba rugi. Dalam analisis ini, perusahaan akan memperoleh pengetahuan berupa komposisi investasi (aset) dan struktur modal(liabilitas). Komposisi investasi dimaksud adalah letak relatif aktiva lancar terhadap aktiva tetap. Sedangkan bentuk modal menggambarkan relativitas utang perusahaan terhadap modal sendiri. Analisis rasio ukuran juga dilakukan untuk membedakan data laporan keuangan perusahaan periode saat ini dan periode sebelumnya, perbedaan antar competitor, atau perbedaan dengan industri.

Daftar Aset BPR (miliar)		
2018	2019	2020

135.570

149.872

155.075

Tabel 1. 1 Daftar Aset BPR Kab. Semarang 2018-2020

Sumber : ojk.go.id

Kabupaten Semarang adalah sebagian daerah di Jawa Tengah. Kabupaten Semarang juga kerap disebut sebagai kawasan industri sebab banyak industri yang masih bermunculan. Sebagian kawasan industri terbesar terletak di Distrik Bergas. Banyaknya industri di Kabupaten Bergas juga mempengaruhi roda perekonomian di wilayah tersebut.

Penelitian ini memilih objek penelitian pada seluruh BRP di Kabupaten Semarang, hal ini dikarenakan Kabupaten Semarang adalah salah satu wilayah di Jawa Tengah yang sering disebut kawasan industri karena terdapat banyak industri yang telah berdiri dan yang masih terus bermunculan. Banyaknya jumlah industri di Kabupaten Semarang mempengaruhi perekonomian di wilayah tersebut. Banyaknya industri yang berdiri di Kabupaten Semarang juga menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat yaitu buruh pabrik. Sehingga berdampak langsung pada profitabilitas BPR yang berada di Kabupaten Semarang yang mayoritas beranggotakan buruh dan UMKM.

Tabel 1. 2 Daftar BPR di Kab. Semarang

NO	Nama	Kabupaten
1.	BPR Klepu mitra kencana	Semarang
2.	BPR inti ambarawa sejahtera	Semarang
3.	BPR ambarawa persada	Semarang
4.	BPR Dana mitra sentosa	Semarang
5.	BPR mitra mulia persada	Semarang
6.	BPR argo dana ungaran	Semarang
7.	BPR mekar nugraha	Semarang
8.	BPR hartasarana	Semarang
9.	BPR restu klepu makmur	Semarang
10.	BPR BKK ungaran (perseroda)	Semarang
11.	BPR Persada ganda	Semarang
12.	BPR satria pertiwi semarang	Semarang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Earning Per Share* (EPS) sebagai rasio yang biasa dipakai dalam prospektus, bahan presentasi, dan laporan tahunan pada pemegang saham yang merupakan laba bersih dikurangi dividen (laba yang dilaporkan tersedia untuk pemegang saham biasa) dibagi dengan rata-rata tertimbang dari saham biasa yang beredar yang akan menghasilkan laba per saham. Jadi *Earning Per Share* (EPS) adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode untuk setiap saham yang beredar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dapat di gali dan dijadikan bahanpenelitian dalam uraian latar belakang masalah diatas adalah :

1. Apakah pengaruh NPL terhadap EPS pada BPR konvensional se Kabupaten Semarang?
2. Apakah pengaruh LDR terhadap EPS pada BPR konvensional se Kabupaten Semarang?
3. Apakah pengaruh CAR terhadap EPS pada BPR konvensional se Kabupaten Semarang?
4. Apakah pengaruh BOPO terhadap EPS pada BPR konvensional se Kabupaten Semarang?
5. Apakah pengaruh SIZE terhadap EPS pada BPR konvensional se Kabupaten Semarang?
6. Apakah pengaruh secara bersama-sama antara NPL, LDR, CAR, BOPO, dan Size terhadap Variabel EPS pada BPR konvensional se Kabupaten Semarang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh NPL terhadap EPS pada BPR konvensional se Kabupaten Semarang?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh LDR terhadap EPS pada BPR konvensional

se Kabupaten Semarang?

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh CAR terhadap EPS pada BPR konvensional se Kabupaten Semarang?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh BOPO terhadap EPS pada BPR konvensional se Kabupaten Semarang?
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh SIZE terhadap EPS pada BPR konvensional se Kabupaten Semarang?

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara bersama-sama antara NPL, LDR, CAR, BOPO, dan Size terhadap Variabel EPS pada BPR konvensional se Kabupaten Semarang?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya, adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai dasar atau acuan untuk peneliti selanjutnya terkait profitabilitas BPR terhadap Earning Per Share.

2. Manfaat Praktis

Sebagai praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi pembaca

Menambah pengetahuan pembaca dan pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang pengaruh profitabilitas BPR terhadap Earning Per Share.

b. Bagi penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperdalam pemahaman penulis tentang teori akuntansi dalam profitabilitas BPR, dan menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana.

c. Bagi Universitas Ngudi Waluyo Ungaran

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi universitas di bidang akuntansi sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan literatur bagi penelitian berikutnya yang bersangkutan dengan profitabilitas BPR.